

KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI GUNA PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bintang Aria Ramadhan
NPP. 29.0453

*Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: asusbintangramadhan@gmail.com

ABSTRAK

Problem Statement/Background (GAP): The COVID-19 pandemic is a non-natural disaster that has occurred in almost all parts of the world, including Indonesia. The government is making efforts in handling the COVID-19 pandemic disaster, one of which is by providing free COVID-19 vaccines to all its people. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the performance of the Bangka Regency Health Office in implementing COVID-19 vaccination in Bangka Regency, to find out the inhibiting factors for the implementation of COVID-19 vaccination in Bangka Regency as well as the efforts made to overcome the inhibiting factors in the implementation of COVID-19 vaccination and to find out how is the awareness of the people of Bangka Regency in the implementation of the COVID-19 vaccination. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Techniques in data collection using observation techniques, interviews and documentation. **Result:** Based on the results of research conducted at the Bangka Regency Health Office, it was concluded that the performance of the Health Office in implementing the COVID-19 vaccination in Bangka Regency was quite good, although there were some that were not optimal. All aspect indicators are quite good except for the responsiveness indicator which is still not optimal. There are several obstacles, namely the lack of public awareness of COVID-19 vaccination, the use of ID cards (ID cards) outside the domicile of Bangka Regency, and the lack of human resources in the implementation of COVID-19 vaccinations. The Bangka Regency Health Office has also made several efforts and solutions to overcome existing obstacles, such as carrying out socialization and promotion of COVID-19 vaccinations, implementing door-to-door COVID-19 vaccinations or picking up the ball, and giving gifts or rewards to people who carry out COVID-19 vaccinations. Public awareness in Bangka Regency in implementing the COVID-19 vaccination itself is still low, this is evidenced by the implementation of vaccinations that must be picked up directly by the Bangka Regency Health Office, especially in rural areas. **Conclusion:** The performance of the Bangka District Health Office is quite good with the existing obstacles, but the existing health workers still need to be improved.

Keywords: Performance, Health Office, Vaccine, COVID-19

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi COVID-19 merupakan bencana non alam yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Pemerintah melakukan upaya dalam penanganan bencana pandemi COVID-19 salah satunya dengan menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakatnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka sudah cukup baik walaupun ada beberapa yang belum optimal. Semua indikator aspek sudah cukup baik kecuali indikator responsivitas yang masih belum maksimal. Terdapat beberapa hambatan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi COVID-19, penggunaan KTP (kartu tanda penduduk) luar domisili Kabupaten Bangka, serta kurangnya SDM dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga melakukan beberapa upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan yang ada seperti melaksanakan sosialisasi dan promosi vaksinasi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 door to door atau jemput bola, dan memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sendiri masih rendah, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan vaksinasi yang harus di jemput ke rumah secara langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka khususnya didcaerah pedesaan. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah cukup baik dengan adanya hambatan-hambatan yang ada akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi tenaga kesehatan yang ada.

Kata kunci: Kinerja, Dinas Kesehatan, Vaksin, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah ada di suatu negara sejatinya dibentuk sebagai suatu organisasi yang memiliki fungsi dan tugas guna mencapai tujuan negara tersebut. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sehingga dapat disimpulkan tujuan negara Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan juga perdamaian. Tujuan perlindungan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang berbunyi "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Hal-hal yang harus dilindungi ini ditujukan kepada komponen-komponen yang membentuk bangsa dan negara Indonesia itu sendiri yakni mulai dari rakyatnya, wilayahnya, kekayaan alamnya, serta nilai-nilai bangsanya. Berdasarkan hal tersebut guna terselenggaranya fungsi pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat agar setiap warga negara hingga individu pada masyarakat leluasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya tanpa merasa terganggu oleh gangguan yang bersifat ancaman ataupun lainnya. Seiring berkembangnya zaman pada era globalisasi ini masalah-masalah

pada masyarakat menjadi semakin luas dan kompleks. Fungsi dan peran pemerintah pun harus fleksibel dan menjadi semakin luas di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hingga sampai saat ini Indonesia sedang menghadapi virus yang kini telah mewabah di seluruh dunia yaitu Coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). COVID 19 merupakan golongan dari Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona atau Coronavirus. Penularan virus ini teridentifikasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah. Setelah diteliti secara ilmiah, virus ini berbeda dengan virus lainnya yang penyebarannya melalui udara. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dari satu individu manusia ke manusia lainnya melalui kontak erat. Gejala yang ditimbulkan oleh orang yang sudah terinfeksi kebanyakan hampir sama dengan sakit lainnya seperti berupa demam, batuk kering, kelelahan sehingga sulit mengidentifikasi secara langsung dan harus dilakukan pengecekan secara khusus. Guna menghadapi serta melindungi rakyatnya dari pandemi ini pemerintah Indonesia gerak cepat dengan mengambil langkah dan kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 serta Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana non alam. Indonesia hingga sampai saat ini masih sedang menghadapi COVID-19 yang mulai berangsur-angsur turun akibat dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu dari 34 provinsi yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan sulit diidentifikasi gejalanya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 kota ini merupakan provinsi yang berbentuk kepulauan yang akses keluar masuk ke provinsi ini hanya bisa melalui jalur udara dan laut. Sehingga ini dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah penduduk 318.756 jiwa. Kasus COVID-19 di pertengahan tahun 2021 pada berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bangka meningkat cukup tinggi sehingga memerlukan respon cepat pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dengan berbagai cara dan upaya guna menyelamatkan kondisi bangsa dari berbagai dampak buruk akibat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka sendiri guna melindungi masyarakat membuat peraturan untuk penanganan bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Bangka. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah saat ini dalam melaksanakan fungsi perlindungannya dalam menanggulangi COVID-19 salah satunya yaitu dengan membuat kebijakan serta berbagai berbagai regulasi yang selalu di perbarui baru terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2021 seperti Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang mengikutsertakan peran Badan Usaha atau Lembaga/Badan Internasional agar progres pelaksanaannya vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia lebih cepat guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Pelayanan kesehatan adalah tolak ukur dalam pengukuran indeks pembangunan masyarakat dimana hal ini tertuang dalam undang-undang yang menyatakan bahwa persoalan hak asasi manusia salah satunya yaitu hak dalam memiliki kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan sebagai perwakilan utama pemerintah dalam penanganan COVID-19 selain BNPB/BPBD, Gugus Tugas/Satgas COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan instansi vertikal yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Nomor no. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Sedangkan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, melaksanakan tugas dan pembinaan sesuai dengan lingkup dan tugasnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangka tentunya menjadi prioritas tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakatnya.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sekarang sedang menjadi perhatian oleh banyak orang dikarenakan saat ini COVID-19 di Kabupaten Bangka masih mengalami kenaikan dan tidak tahu kapan akan berakhirnya penyebaran COVID-19 ini. Peran dinas kesehatan dalam menghimbau masyarakat di kabupaten bangka dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam penyebaran COVID-19 di daerah Kabupaten Bangka. Pemerintah menjadikan pemberian vaksin/vaksinasi sebagai prioritas dalam hal penanganan penyebaran COVID-19. Pemberian vaksin memiliki fungsi guna mengurangi penularan COVID-19 dari individu ke individu lainnya, mengurangi angka kesakitan akibat COVID-19, serta guna mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). Pengambilan kebijakan oleh pemerintah dengan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebarluasan COVID-19 yang harus dilaksanakan secara maksimal. Melalui Dinas Kesehatan sebagai pelaksana yang dipercayakan pemerintah untuk pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya guna tercapainya tujuan dalam penanganan penyebarluasan COVID-19.

1.2. Kesenjangan Masalah

Pelayanan kesehatan adalah tolak ukur dalam pengukuran indeks pembangunan masyarakat dimana hal ini tertuang dalam undang-undang yang menyatakan bahwa persoalan hak asasi manusia salah satunya yaitu hak dalam memiliki kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan sebagai perwakilan utama pemerintah dalam penanganan COVID-19 selain BNPB/BPBD, Gugus Tugas/Satgas COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan instansi vertikal yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Nomor no. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Sedangkan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, melaksanakan tugas dan pembinaan sesuai dengan lingkup dan tugasnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangka tentunya menjadi prioritas

tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakatnya.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sekarang sedang menjadi perhatian oleh banyak orang dikarenakan saat ini COVID-19 di Kabupaten Bangka masih mengalami kenaikan dan tidak tahu kapan akan berakhirnya penyebaran COVID-19 ini. Peran dinas kesehatan dalam menghimbau masyarakat di kabupaten bangka dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam penyebaran COVID-19 di daerah Kabupaten Bangka. Pemerintah menjadikan pemberian vaksin/vaksinasi sebagai prioritas dalam hal penanganan penyebaran COVID-19. Pemberian vaksin memiliki fungsi guna mengurangi penularan COVID-19 dari individu ke individu lainnya, mengurangi angka kesakitan akibat COVID-19, serta guna mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). Pengambilan kebijakan oleh pemerintah dengan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebarluasan COVID-19 yang harus dilaksanakan secara maksimal. Melalui Dinas Kesehatan sebagai pelaksana yang dipercayakan pemerintah untuk pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya guna tercapainya tujuan dalam penanganan penyebarluasan COVID-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Kesehatan khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Penelitian oleh Hendra Wijayanto (2011) melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS)”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menjadi institusi bidang kesehatan di kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini merujuk dari pengukuran pada indikator-indikator pengukuran kinerja bahwa kinerja Dinas Kesehatan kota Surakarta dalam pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sudah cukup baik. Faktor pendorong kinerja yaitu kerja sama antara puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan faktor penghambat kinerjanya yaitu adanya masalah dana, partisipasi masyarakat masih kurang, masih minimnya sarana prasarana hingga fasilitas di RSUD dan belum pahamnya masyarakat mengenai pelayanan PKMS yang sifatnya berjenjang.

Penelitian Doddhik Ardhi Dhahono (2010) melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang”. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Surakarta dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Hasil dari penelitian ini merujuk dari pengukuran pada indikator-indikator pengukuran kinerja yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas bahwa kinerja Dinas Kesehatan Surakarta belum cukup baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Surakarta dalam pengawasan depot isi ulang yaitu masalah dana untuk menunjang kegiatan pengawasan, dan kurang aktifnya pengusaha-pengusaha depot isi ulang.

Zainal Muhlisin, Deli Anhar, Fika Febriyanita melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Penularan Penyebaran Cepat Covid-19 Di Kota Banjarmasin.” Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran di bidang instansi pemerintah di Dinas Kesehatan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam peranan dinas kesehatan dalam menanggulangi penyebaran

COVID-19 di kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Penyebaran COVID-19 Di Kota Banjarmasin berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi di arahkan oleh Pemerintah Daerah, namun masih ada beberapa faktor hambatan dalam peranan Dinas Kesehatan dalam menanggulangi dan pencegahan yang harus diperbaiki kedepannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana baik konteks dan lokus penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berjudul Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi guna percepatan penanganan bencana pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangka, selain itu fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Pada teori kinerja yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2015:16) yang menyatakan bahwa tingkat pencapaian hasil kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu: output, efisiensi, dan efektivitas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka dan upaya apa saja guna mengatasi faktor penghambat tersebut. Tujuan lainnya yaitu mengetahui dan menganalisis bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penulis melaksanakan penelitian kualitatif, guna untuk meneliti keadaan objek alami, yang mana penelitalah kunci utamanya. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah, dimana dilakukan studi holistik tentang kondisi alam, sehingga sumber-sumber data yang didapatkan bersifat naturalistik secara langsung, tidak dapat dimanipulasi, dan terbuka bagi siapa saja yang muncul di kemudian hari.. Penelitian deskriptif juga memiliki karakteristik dengan lebih menekankan pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan upaya mendapatkan serta menyampaikan fakta-fakta dengan rinci, teliti, dan mudah dipahami tanpa adanya banyak unsur-unsur yang tidak berkaitan. Sementara itu, metode kualitatif diaplikasikan guna mendapatkan data magang sebagai jawaban atas permasalahan dan sebab akibat melalui beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi secara empiris. Pendekatan induktif akan menjabarkan latar secara penuh dan terus mencari pengaruh atas hubungan (sebab-akibat) sampai pada penetapan keputusan.

Penulis mengumpulkan data melalui, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang

informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Kepala Puskesmas Sungailiat, Kepala Puskesmas Sinar Baru, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi 5 orang). Adapun analisisnya menggunakan teknis analisis data model Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002:94-96), yang menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto yang pada teori tersebut terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya baik faktor penghambat maupun faktor pendukung kinerja dalam mencapai tujuannya. Dengan menilai kinerjanya maka dapat dilakukan perbaikan secara kinerja dengan lebih sistematis sehingga Dinas Kesehatan dapat mewujudkan tujuannya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangka. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Konsep produktivitas pada umumnya meliputi input dan output, maksudnya bagaimana dan sejauh apa upaya yang sudah dilaksanakan dengan hasil yang sudah didapat atau diperoleh pada suatu waktu atau periode tertentu. Akan tetapi konsep produktivitas diluaskan dengan menambahkan bagaimana pelayanan publik itu mencapai hasil yang menjadi sasaran sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja. Konsep produktivitas pada penelitian ini menekankan pada sejauh apa pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka apakah sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dari beberapa pernyataan dari informan dapat di ketahui dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah memiliki target-target yang jelas. Dengan fasilitas sarana prasarana yang baik target-target yang ada dapat tercapai. Target-target tersebut merupakan target pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bersifat nasional, karena juga merupakan terget yang di tuntutan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah yang bertujuan untuk percepatan penanganan bencana pandemi COVID-19 di negara ini agar pemulihan ekonomi negara dapat kembali juga.

3.2. Kualitas Layanan

Indikator kualitas layanan atau service quality merupakan suatu dasar utama guna mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan atau konsumen. Kualitas layanan sangatlah penting guna melihat kinerja suatu organisasi publik. Kualitas layanan suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi hal ini dikarenakan kualitas layanan pada suatu organisasi dapat memberikan citra atau gambaran baik buruknya suatu organisasi pelayanan. Secara garis besar pelayanan yang

baik dan optimal selalu dikaitkan dengan ketepatan waktu serta pelayanan dengan mekanisme yang sesuai. Sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung ataupun tidak langsung kualitas layanan yang diberikan dan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan dan dijadikan sebagai indikator dalam kinerja suatu organisasi publik.

Informasi tersebut didapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang menunjukkan bahwa pelayanan oleh aparatur dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Seluruh aparatur dan tenaga kesehatan sudah maksimal memberikan pelayanan sesuai dengan arahan dan strategi dari Dinas Kesehatan sehingga dapat mencapai target yang akan dicapai.

Masyarakat lainnya juga bekesimpulan pelayanan yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka cukup baik. Sehingga secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, tidak hanya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka saja tetapi juga seluruh elemen, OPD yang ikut membantu mensukseskan kegiatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka dinilai baik.

3.3. Responsivitas

Kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi dapat dilihat dari kesiapan dari Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka salah satunya yakni dalam memahami keadaan yang terjadi di masyarakat juga. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga dituntut memiliki kemampuan yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memahami, mempelajari dan menyusun strategi yang tepat dengan mempertimbangkan keluhan, tuntutan, serta kritik yang di berikan masyarakat melalui komunikasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka serta Dinas OPD terkait dengan masyarakat guna membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk menentukan langkah yang tepat selanjutnya guna pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Responsivitas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan melihat informasi yang didapatkan dapat disimpulkan cukup baik dalam membuat strategi serta ketepatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Pemkab Bangka dalam hal ini Dinas Kesehatan yang bekerja sama dan bersinergi dengan komponen lainnya dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan strategi yang dapat dikatakan cukup tepat untuk diterapkan.

Sumber Daya Manusia yang cukup untuk pelaksanaan vaksinasi tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tidak bisa sembarangan orang dapat menjadi petugas vaksinasi, melainkan harus memiliki kemampuan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan vaksinasi ini merupakan suatu yang dapat memberikan hambatan dalam pelaksanaannya.

3.4. Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan atau program harus dilakukan dengan prinsip-prinsip prosedural yang telah ditetapkan dengan baik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sebagai organisasi pelayanan publik melaksanakan setiap programnya sesuai dengan aturan dasar hukum yang telah ditetapkan dan kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga harus dilaksanakan sesuai dengan Aturan dan Kebijakan yang berlaku. Kinerja dinas harus dilaksanakan dengan baik pada seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana pelaksanaan vaksinasinya sudah berdasarkan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada selalu diterapkan saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimanapun dan kapanpun. Hal ini sudah harus menjadi kewajiban agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Di Kabupaten Bangka.

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka sudah dilaksanakan dengan baik sebab sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.

3.5. Akuntabilitas

Organisasi publik dituntut memiliki akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini indikator akuntabilitas berfungsi untuk menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan nilai yang ada pada masyarakat.

Dalam hal ini pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut, termasuk seluruh pihak atau OPD terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat harus bekerja dengan maksimal dengan kedisiplinan serta profesionalitas terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan informasi di atas dengan adanya pertanggung jawaban pelaporan seperti diatas dapat di simpulkan akuntabilitas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah cukup baik. Pelaporan terkait dana atau keuangan COVID-19 Kabupaten Bangka yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Bangka dapat dilihat pada lampiran.

3.6. Faktor Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pihak terkait mengenai permasalahan penanggulangan banjir, penulis mendapatkan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka yaitu sebagai berikut

a) Penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Luar Domisili Kabupaten Bangka

Hal tersebut merupakan kendala yang terjadi dalam hal pemenuhan target atau sasaran. Karena pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan menggunakan Kartu identitas yang berdomisili di luar Kabupaten Bangka tidak termasuk sasaran, karena sasaran atau target vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan adalah untuk penduduk Kabupaten Bangka. Untuk penduduk yang kartu identitasnya selain dari Kabupaten Bangka tetap bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 di

Kabupaten Bangka akan tetapi tidak tercatat dalam penduduk Kabupaten Bangka yang sudah di vaksinasi COVID-19 karena bukan termasuk target atau sasaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan vaksinasi COVID-19

Masyarakat Kabupaten Bangka masih kurang peduli dengan yang namanya vaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih bersifat kedaerahan yang kuat. Hal tersebut banyak ditemukan di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan masih berpikir tidak memerlukan vaksinasi COVID-19. Selain itu masyarakat juga banyak yang masih terkena “HOAX” atau berita palsu yang berkembang mengenai vaksin COVID-19. Hal tersebut menyebar ke masyarakat dan menyebabkan masyarakat ragu untuk menerima vaksin COVID-19.

c) Kurangnya SDM dalam Pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di dalam pencapaian targetnya selain dibutuhkan stock vaksin yang memadai tetapi juga dibutuhkan SDM yang memadai juga agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat berjalan lancar sesuai rencana. SDM yang kurang ini dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sumber Daya Manusia yang cukup untuk pelaksanaan vaksinasi tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tidak bisa sembarangan orang dapat menjadi petugas vaksinasi, melainkan haru memiliki kemampuan dan pelatihan seusai dengan bidangnya.

3.7. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka

a) Melaksanakan Sosialisasi dan Promosi vaksinasi COVID-19

Sosialisasi merupakan salah satu upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Hal ini dilakukan guna memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman sekaligus mempromosikan kepada masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19 agar terhindar dari berita palsu atau HOAX. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka akan pentingnya vaksinasi COVID-19.

b) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 door to door atau jemput bola

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan sistem jemput bola ini sangat efektif dilakukan. Hal ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung rumah-rumah yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sistem ini dilaksanakan dengan cara mendata terlebih dahulu rumah-rumah yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Ketua RT/RW setempat.

c) Memberikan Reward atau Hadiah

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka yakni dengan memberikan reward atau hadiah kepada masyarakat yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada ajang-ajang tertentu. Contohnya pada hari-hari besar atau pun pada acara-acara yang dapat menarik perhatian masyarakat Kabupaten Bangka. Hadiah atau reward ini biasanya dapat berupa souvenir ataupun sembako. Dengan adanya hadiah atau reward ini diharapkan masyarakat Kabupaten Bangka dapat lebih tertarik sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan bencana pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah melalui Dinas Kesehatan sebagai komponen utama dalam pelaksanaan vaksinasi di tiap daerah. Tujuan utama dalam pelaksanaan vaksinasi ini yakni membuat kekebalan kelompok atau *herd immunity* di masyarakat. Dengan terbentuknya kekebalan kelompok atau *herd immunity* maka penyebaran COVID-19 akan terputus. Hal ini dibuktikan dengan mulai landainya kasus positif COVID-19 di Indonesia berkat upaya pemerintah baik melalui vaksinasi maupun pembatasan kegiatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga turut memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi guna percepatan penanganan bencana pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Disinilah kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka dapat dilihat. Peneliti menggunakan Teori pengukuran kinerja dari Agus Dwiyanto (2015:16) yang mengukur kinerja dari 5 indikator yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari pengukuran kinerja berdasarkan teori tersebut kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi dikatakan sudah cukup baik tetapi masih harus meningkatkan SDM yang ada dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya didapati beberapa faktor penghambat yang terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan kartu identitas penduduk berdomisili luar Kabupaten Bangka, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi serta kurangnya SDM dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dinas Kesehatan juga melakukan upaya guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka. Yakni dengan cara Mensosialisasikan serta mempromosikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat agar terhindar dari berita palsu (hoax) yang beredar dikalangan masyarakat. Upaya lainnya yakni dengan melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan sistem jemput bola atau *door to door* yang dimana masyarakat yang didata belum melaksanakan vaksinasi akan didatangi ke rumahnya untuk melaksanakan vaksinasi. Memberikan reward atau hadiah kepada masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk menarik perhatian dan minat masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari indikator yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi sudah cukup baik

dilihat dari aspek indikator-indikator seperti aspek Produktivitas karena sudah mencapai output dan input atau sasaran yang sudah ditargetkan bahkan lebih walaupun masih ada kendala dengan yang terjadi dilapangan. Aspek Kualitas Layanan juga sudah cukup baik dengan melihat kepuasan masyarakat. Sementara itu untuk aspek Responsibilitas dan Akuntabilitas dinilai sangat baik karena pada aspek Responsibilitas sudah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur dan dasar hukum yang ada dan sudah ditetapkan. Aspek Akuntabilitas dilaksanakan dengan baik dengan membuat pertanggungjawaban berupa laporan-laporan yang selalu dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sedangkan untuk aspek Responsivitas dinilai cukup karena didapatkan masih ada kekurangan berupa kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka sehingga menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangka masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menjadi terhambat, diantaranya: penggunaan KTP (kartu tanda penduduk) luar domisili Kabupaten Bangka, kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi COVID-19, dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Upaya-upaya atau solusi telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diantaranya: melaksanakan sosialisasi dan promosi vaksinasi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 door to door atau jemput bola, dan memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat yang melaksanakan vaksinasi COVID-19.
3. Kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka masih rendah akan pentingnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan vaksinasi yang harus di jemput ke rumah langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka khususnya didaerah pedesaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kabupaten Bangka saja sebagai lokus studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan menggunakan metode yang berbeda sehingga temuan yang didapat sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Hasil temuan tersebut dapat berguna sebagai referensi kajian keilmuan dalam pembuatan kebijakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian Edisi Duabelas. Jakarta: Rineka Cipta
Chaizi, Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grafind

H. B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.

Joko Widodo. 2008. Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun , Moh. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Mahsun, Moh. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Bandung: Mandar Maju.

Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2008. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang Jawa Timur : Bayu Media Publishing

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka

Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

Jurnal

Andry, Hendry. (2014). Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. JIS. Vol. 7 (1):56-67.

Juhani Ukko. 2008. The impacts of performance measurement on the quality of working life. Journal of Business Performance Management. Vol 10

Putra, Leo Inra Mariga. (2015). Peran Dinas Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan). Ejournal Pemerintahan Integratif. Vol. 3 (4): 562-563.

ZAINAL MUHLISIN, NPM. “ Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Penularan Penyebaran Cepat COVID-19 Di Kota Banjarmasin”(Dinas Kesehatan di Jl. Tirta Dharma Kota Banjarmasin)”. Banjarasin : Fisip Uniska

Sumber Lain

Ardhi Dhahono, Doddhik. 2010. “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

Bernardin dan Russel dalam Ruky, 2002, Pengertian Kinerja diakses dari <http://teorionline.wordpress.com/category/kumpulan-teori/msdm/> diakses pada tanggal 1 september 2021

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-COVID-19-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 2 September 2021

<https://nasional.kontan.co.id/news/update-corona-indonesia-31-agustus-tambah-10534-kasus-baru-sembuh-tambah-16781> diakses pada tanggal 2 September 2021

<https://COVID19.bangka.go.id/> diakses pada tanggal 2 September 2021

<https://COVID19.babelprov.go.id/> diakses pada tanggal 2 September 2021

Wijayanto, Hendra. 2011. “Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (Pkms)”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

